



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KOORDINASI BADAN LEGISLASI DPR RI
DENGAN PIMPINAN KOMISI-KOMISI DAN PANSUS DALAM RANGKA
EVALUASI PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2016**

TANGGAL 25 MEI 2016

Tahun Sidang	: 2015- 2016
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	: 7 (tujuh).
Jenis rapat	: Rapat Koordinasi Badan Legislasi.
Hari/tanggal	: Rabu, 25 Mei 2016.
P u k u l	: 14.15 s/d 16.30 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Evaluasi pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 oleh Komisi-Komisi dan Pansus.
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, SE., M.H.
Sekretaris	: Liber Salomo Silitonga, S.IP.
Hadir	: - 42 orang, izin 15 orang dari 73 orang Anggota. - Pimpinan Komisi-Komisi - Pimpinan Pansus-Pansus

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Koordinasi Badan Legislasi dengan Pimpinan Komisi-Komisi dan Pansus dalam rangka evaluasi pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, SE., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.15 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Pimpinan Komisi dan Pansus untuk menyampaikan pandangan/masukannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Masukan/Pandangan dari Pimpinan Komisi dan Pansus terkait dengan evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016, sebagai berikut :

1. Komisi I DPR RI : tidak hadir
2. Komisi II DPR RI, sebagai berikut :
 - Komisi II sedang melakukan pembahasan RUU dari Pemerintah yaitu RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan dijadwalkan akan selesai dalam Masa Persidangan V Tahun Sidang 2015-2016.
 - Komisi II juga menunggu turunnya Surat Presiden atas RUU tentang Pertanahan yang telah disampaikan kepada Presiden pada bulan Maret 2016 yang lalu.
3. Komisi III DPR RI, sebagai berikut :
 - RUU yang sedang dibahas Komisi III saat ini adalah RUU tentang KUHP yang telah memasuki masa perpanjangan karena telah dibahas sejak Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2014-2015 (lebih dari 3 Masa Persidangan).
 - RUU lainnya adalah RUU tentang Jabatan Hakim yang telah disampaikan kepada Badan Legislasi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi.
4. Komisi IV DPR RI : tidak hadir
5. Komisi V DPR RI, sebagai berikut :
 - RUU yang sedang dibahas oleh Komisi V adalah RUU tentang Jasa Konstruksi dan ditargetkan akan selesai dalam Masa Persidangan V tahun ini.
 - Terkait dengan RUU tentang Arsitek, pembahasannya akan segera dilaksanakan setelah adanya penugasan dari Badan Musyawarah.
 - Selain kedua RUU tersebut, Komisi V juga telah melakukan penyusunan atas RUU tentang Jalan.
6. Komisi VI DPR RI : tidak hadir
7. Komisi VII DPR RI, sebagai berikut :
 - Komisi VII masih melakukan kegiatan penyusunan terhadap RUU yang menjadi tanggungjawabnya yaitu RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - Terdapat beberapa kesulitan dari Komisi VII dalam melaksanakan penyusunan tersebut, diantaranya adalah tidak terpenuhinya kourum dalam rapat-rapat yang diadakan.
8. Komisi VIII DPR RI, sebagai berikut :

- RUU Prioritas Tahun 2016 yang menjadi tanggung jawab Komisi VIII adalah RUU tentang Penyandang Disabilitas; RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah; RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; dan RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial.
 - RUU tentang Penyandang Disabilitas telah disahkan menjadi Undang-Undang dan RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah akan memasuki Pembicaraan Tingkat I / menunggu Surpres.
 - Komisi VIII saat ini melanjutkan proses legislasi dengan menyusun dan membentuk RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan selanjutnya akan disusun pula RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial.
9. Komisi IX, Komisi X : tidak hadir
10. Komisi XI DPR RI, sebagai berikut :
- Komisi XI mendapatkan penugasan pembahasan RUU yang berasal dari Pemerintah, yaitu RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; RUU tentang Pengampunan Pajak; dan pembahasan ratifikasi.
 - Komisi XI mengusulkan perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016, yaitu RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
 - Kendala yang dihadapi oleh Komisi XI dalam melakukan pembahasan adalah terkait dengan dukungan anggaran yang terbatas.
11. Pansus RUU tentang Wawasan Nusantara, sebagai berikut :
- Pansus Wawasan Nusantara dibentuk pada tanggal 18 Desember 2015, namun karena rapat-rapat internal yang dilakukan tidak pernah memenuhi kourum, maka Pimpinan Pansus baru terpilih pada tanggal 27 April 2016
 - Pansus ini terkendala pada tingkat kehadiran/kourum pada saat pelaksanaan rapat-rapat.
12. Pansus RUU tentang Merek, sebagai berikut :
- Pansus ini dibentuk dan mulai membahas pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2014-2015.
 - Pembahasan RUU tentang Merek sudah memasuki 5 (lima) kali Masa Sidang dan sudah mendapatkan perpanjangan waktu sebanyak 3 kali Masa Sidang.
 - Berdasarkan Rapat Panja yang telah dilakukan, Panja dan Pemerintah telah sepakat untuk melakukan perubahan judul RUU, yang semula "RUU tentang Merek" berubah menjadi "RUU tentang Merek dan Indikasi Geografis".
 - Kendala pembahasan RUU tentang Merek selama ini adalah rapat-rapat yang tidak kourum, hal ini dikarenakan kesibukan Anggota Pansus di beberapa AKD lainnya.
13. Pansus RUU tentang Paten, sebagai berikut :

- RUU tentang Paten merupakan RUU usul Pemerintah dan mulai dibahas oleh Pansus pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2014-2015.
 - Pembahasan RUU tentang Paten sudah memasuki 5 (lima) kali Masa Sidang dan sudah mendapatkan perpanjangan waktu sebanyak 3 kali masa sidang.
 - Pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2015-2016, Pansus telah melakukan pembahasan sampai tahap Panja, dan Panja telah menyelesaikan seluruh materi Panja RUU tentang Paten yang terdiri dari 707 DIM, 19 bab, dan 165 pasal.
 - Pada Masa Sidang V Tahun Sidang 2015-2016, pembahasan selanjutnya akan masuk dalam tahap Tim Perumus sebanyak 130 DIM yang terdiri dari 68 pasal.
14. Pansus RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, sebagai berikut :
- Pembahasan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol sudah memasuki 4 (empat) kali masa sidang, dan sudah mendapatkan perpanjangan waktu sebanyak 2 kali masa sidang.
 - Materi RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol yang akan dibahas oleh Panja sebanyak 146 DIM yang terdiri dari 24 pasal dan 7 bab.

B. Tanggapan/pandangan Anggota terhadap laporan komisi-komisi dan Pansus terkait dengan pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016, sebagai berikut :

1. Berdasarkan laporan dari komisi-komisi, pembahasan RUU yang berasal dari DPR terbentur dengan terlalu lama Supres yang dikeluarkan oleh Presiden.
2. Terhadap Surpres/Ampres yang belum dikeluarkan oleh Presiden, diharapkan agar Pimpinan DPR dapat membantu melalui surat ke Presiden untuk menyegerakannya.
3. Mengusulkan untuk melakukan konferensi pers terkait dengan tanggapan jangka waktu dikeluarkannya Surpres agar dapat mendorong Pemerintah untuk melakukan percepatan.
4. Terkait adanya usulan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, kiranya pembahasan RUU tersebut dapat diberikan kepada Komisi VIII.
5. Masih adanya permasalahan terkait dengan pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016, kiranya dapat diselesaikan diantaranya dengan melakukan revisi terhadap Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib.
6. Mengusulkan agar Komisi VI dapat melakukan/mengusulkan untuk membahas RUU tentang Koperasi yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.
7. Mengusulkan RUU tentang Otonomi Khusus Papua untuk dapat masuk dalam Perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016, hal ini dikarenakan undang-undang yang mengatur tentang Papua sudah tidak dapat diterapkan di masyarakat.

8. Perlu mendapatkan perhatian dan pemecahan masalah dari Pimpinan DPR dan juga Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan terkait dengan hambatan dalam pelaksanaan rapat, yaitu pemenuhan kourum Rapat.
9. Mengusulkan agar untuk menjadwalkan 1(satu) masa sidang yang khusus melakukan pembahasan RUU dan tidak diperbolehkan melakukan kunjungan spesifik pengawasan.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Koordinasi Badan Legislasi dengan Pimpinan Komisi-Komisi dan Pansus dalam rangka evaluasi pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah dan DPR harus berkomitmen dalam melakukan pembahasan RUU.
2. Pimpinan komisi/Pansus harus dapat mencari solusi untuk mengatasi persoalan teknis yang menghambat pembahasan RUU tersebut.

Rapat ditutup pukul 16.30 WIB

Jakarta, 25 Mei 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

LIBER SALOMO SILITONGA, S.IP.
NIP.19650428 199603 1 001